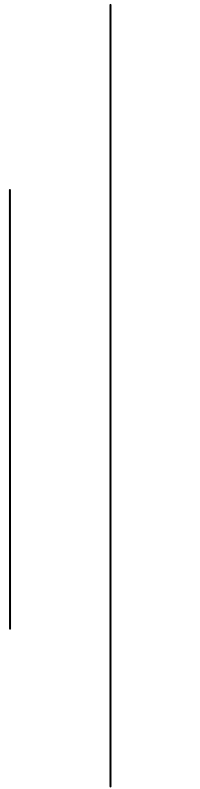




**PENETAPAN PERUBAHAN RENCANA KERJA  
PERANGKAT DAERAH  
TAHUN ANGGARAN 2021**



**DINAS PERHUBUNGAN KABUPATEN MAGELANG  
TAHUN 2021**

## KATA PENGANTAR

Dengan memanjatkan puji syukur kehadirat Allah SWT, yang telah melimpahkan Rahmat dan Hidayah-Nya sehingga Penyusunan Penetapan Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah Dinas Perhubungan Kabupaten Magelang Tahun 2021 ini dapat diselesaikan dengan baik. Penetapan Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah Dinas Perhubungan Kabupaten Magelang Tahun 2021 ini memuat kondisi umum, tujuan, sasaran, isu - isu strategis yang menjadi agenda pembangunan bidang perhubungan pada Dinas Perhubungan Kabupaten Magelang untuk Tahun Anggaran 2021 menyesuaikan Perangkat Daerah Baru.

Pada kesempatan ini kami menyampaikan terima kasih kepada semua pihak yang telah memberikan dukungan dan partisipasinya dengan harapan pelaksanaan nanti senantiasa diberikan kelancaran dan dapat diwujudkan serta memberikan dampak terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Akhirnya kami berharap agar Penetapan Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah Dinas Perhubungan Kabupaten Magelang Tahun 2021 ini dapat bermanfaat dan dijadikan panduan serta acuan bagi Dinas Perhubungan dalam melaksanakan tugas dan fungsi serta peranannya masing-masing dalam upaya peningkatan pelayanan kepada masyarakat.

Kota Mungkid, September 2021

KEPALA DINAS PERHUBUNGAN  
KABUPATEN MAGELANG



**IMAM BASORI, S.Sos., M.Si.**

Pembina Utama Muda

NIP. 19701115 199003 1 003

## DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL .....	i
KATA PENGANTAR .....	ii
DAFTAR ISI .....	iii
BAB I : PENDAHULUAN .....	1
1.1. Latar Belakang .....	1
1.2. Landasan Hukum .....	2
1.3. Maksud dan Tujuan .....	3
1.4. Sistematika Penulisan .....	4
BAB II : EVALUASI PELAKSANAAN RENJA S/D TW II TA 2021 .....	5
2.1. Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kerja Perangkat Daerah s/d TW II.....	5
2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah.....	10
2.3. Isu – Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah.....	12
BAB III : RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PD.....	12
4.1. Program dan Kegiatan Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2021.....	13
BAB IV : PENUTUP.....	19
LAMPIRAN	

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang**

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2021 adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode jangka pendek satu tahun perubahan Tahun Anggaran 2021 yang telah disempurnakan dibahas dengan pemangku kepentingan untuk memperoleh saran dan pertimbangan. Penyusunan Penetapan Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2021 berpedoman pada Rancangan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2019 – 2024 bertujuan untuk menjamin kesesuaian antara program, kegiatan, lokasi kegiatan, kelompok sasaran, serta hasil verifikasi oleh Tim Bappeda dan Litbangda untuk memastikan rancangan akhir Penetapan Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah telah selaras dengan Peraturan Kepala Daerah tentang Perubahan RKPD. Fungsi Penyusunan Penetapan Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2021 adalah sebagai acuan dalam penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi Perangkat Daerah dalam membangun daerah sebagai turunan dari Rencana Strategis dalam pembangunan daerah menyesuaikan Perangkat Daerah baru. Penetapan Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2021 memuat hasil evaluasi Rencana Kerja sampai dengan Triwulan II tahun 2021, serta Rencana kerja dan Pendanaan Perangkat Daerah Tahun Anggaran 2021, berpedoman pada Rencana Strategis Perangkat Daerah dalam rangka optimalisasi pencapaian sasaran Rencana strategis Perangkat Daerah.

Kabupaten Magelang dalam menyelenggarakan tugas pemerintahan pembangunan dan kemasyarakatan senantiasa mengupayakan untuk meningkatkan dan pemeratakan pelayanan dan kesejahteraan masyarakat. Dalam rangka peningkatan implementasi kebijakan otonomi daerah, pemerintah Kabupaten Magelang mempunyai kewenangan yang lebih luas untuk mengatur daerah yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Berdasarkan Permendagri 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rancangan Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana

Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah. Untuk merealisasikan rencana tersebut, dengan mempedomani tugas pokok dan fungsi yang ada, maka perlu dijelaskan kendala bentuk kebijakan, program dan kegiatan, Rencana Kerja dan pendanaan Perangkat Daerah, dalam bentuk Penetapan Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah yang berlaku pada Tahun Anggaran 2021.

## **1.2. Landasan Hukum**

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2021 disusun dengan berdasarkan pada :

1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 38 tahun 2007 tentang Pembagian Uraan pemerintah antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan Tata Cara Penyusunan Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008

- Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan Tata Cara Penyusunan Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
  7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah;
  8. Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 28 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2008 Nomor 28);
  9. Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Magelang;
  10. Perda RPJMD Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 5 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2019 - 2024 (Lembaran Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2019 Nomor 5);
  11. Peraturan Bupati Magelang Nomor 55 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta tata Kerja Dinas Perhubungan (Berita Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2016 Nomor 55);
  12. Peraturan Bupati Magelang Nomor 11 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Magelang Nomor 55 Tahun 2020 tentang Penjabaran APBD Kabupaten Magelang Tahun Anggaran 2021 tanggal 7 Juni 2021;
  13. Peraturan Bupati Magelang Nomor 28 Tahun 2021 tentang Perubahan RKPD Kabupaten Magelang Tahun 2021;
  14. Keputusan Bupati Magelang Nomor 180.182/277/KEP/24/2021 tentang Perubahan Rencana Kerja Perangkat daerah kabupaten Magelang tahun 2021.

### **1.3 Maksud dan Tujuan.**

Maksud dan tujuan penyusunan Dokumen Penetapan Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2021 Dinas Perhubungan Kabupaten Magelang dan tujuan rencana strategis yaitu penyediaan dokumen perencanaan pembangunan yang berisi :

- a) Program indikatif yang penyusunannya mengacu dan berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Magelang Tahun 2019 - 2024;
- b) Program indikatif yang penyusunannya mengacu dan berpedoman pada Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Magelang;
- c) Program indikatif yang penyusunannya mengacu dan berpedoman pada Rencana Strategis Dinas Perhubungan Kabupaten Magelang;

Adapun tujuan penyusunannya adalah menjabarkan rencana program dan kegiatan serta menetapkan target-target kinerja dan pendanaan indikatif tahunan sebagai bentuk komitmen organisasi bagi pencapaian kinerja yang optimal, serta sebagai arah dan acuan :

- a) Menyusun Rencana Kerja Anggaran Perubahan dan Dokumen Perubahan Pelaksanaan Anggaran;
- b) Menyusun Penilaian Kinerja Tahunan (LKjIP);
- c) Untuk menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan pada setiap tahun anggaran;
- d) Untuk menjamin tercapainya penggunaan sumberdaya secara efektif dan efisien, berkeadilan dan berkelanjutan;
- e) Untuk menjamin terciptanya integritas, sinkronisasi dan sinergi antara Sekretariat dan Bidang-Bidang pada Dinas Perhubungan Kabupaten Magelang.

#### **1.4. Sistematika Penulisan.**

Sistematika penulisan Dokumen Penetapan Perubahan Rencana Kerja Tahun 2021 Dinas Perhubungan Kabupaten Magelang mengacu kepada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah sebagai berikut :

## BAB I PENDAHULUAN

- 1.1. Latar belakang
- 1.2. Landasan hukum
- 1.3. Maksud dan tujuan
- 1.4. Sistematika penulisan

## BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENCANA KERJA PD TAHUN LALU

- 2.1. Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah
- 2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah
- 2.3. Isu – Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah

## BAB III RENCANA KERJA DAN PENDANAAN Perangkat Daerah

- 3.1. Program dan Kegiatan Rancangan Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2021

## BAB IV PENUTUP



## **BAB II**

### **EVALUASI PELAKSANAAN RENCANA KERJA SAMPAI DENGAN TRIWULAN II**

#### **2.1. Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kerja Perangkat Daerah Sampai dengan Triwulan II**

Program pembangunan daerah Dinas Perhubungan Kabupaten Magelang tahun 2021 terdapat Dua (2) program dan tiga belas (13) kegiatan :

- A. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
- B. Program Penyelenggaraan Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan (LLA).

Hasil Evaluasi sampai dengan Triwulan II Tahun Anggaran 2021 pada Dinas Perhubungan Kabupaten Magelang adalah sebagai berikut:

**Tabel 2.1**

**Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kerja Perangkat Daerah sampai dengan Triwulan II TA 2021**

KODE	URUSAN / PROGRAM	CAPAIAN KINERJA		ANGGARAN TAHUN 2021	TARGET ANGGARAN s/d TRIWULAN II TAHUN 2021	REALISASI ANGGARAN s/d TRIWULAN II TAHUN 2021				
		%	PREDIKAT KINERJA			SPJ	%	PREDIKAT KINERJA		
1	2	3	4	5	6	7	8 = 7/5	9		
<b>2</b>	<b>15</b>		<b>URUSAN PEMERINTAH BIDANG PERHUBUNGAN</b>							
2	15	01	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten / Kota	50,27	Rendah	6.232.016.500	3.205.090.980	2.952.585.036	47,38	Sangat Rendah
			Persentase ketercapaian perencanaan, evaluasi kinerja OPD dan keuangan perangkat daerah							
			Persentase ketercapaian pelayanan umum dan kepegawaian perangkat daerah							
2	15	02	Program Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ)	50,78	Rendah	21.965.265.230	12.009.330.779	10.273.889.251	46,77	Sangat Rendah
			Persentase ketersediaan fasilitas perlengkapan jalan pendukung pengamanan dan keselamatan lalu lintas							
			<b>JUMLAH</b>	<b>50,66</b>	<b>Rendah</b>	<b>28.197.281.730</b>	<b>15.214.421.759</b>	<b>13.226.474.287</b>	<b>46,91</b>	<b>Sangat Rendah</b>

Hasil evaluasi pelaksanaan program pada Perangkat Daerah Dinas Perhubungan yang terdiri dari Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar Perhubungan, dengan jumlah 2 program. Hasil evaluasi memperlihatkan bahwa:

2 (dua) program masuk dalam predikat kinerja rendah,

Secara keseluruhan, hasil evaluasi terhadap pelaksanaan program pada Perangkat Daerah Dinas Perhubungan masuk dalam predikat sedang dengan nilai 50,66 %.

Faktor pendorong tingginya capaian kinerja adalah:

1. Pekerjaan menyesuaikan alur kas, dan telah terlaksana dengan baik;
2. PPTK mencermati alur kas yang telah dibuat;
3. PPTK koordinasi aktif dengan PPKom, Panitia Pengadaan dan Instansi terkait;
4. PPTK menyelesaikan permasalahan yang dihadapi.

Faktor penghambat capaian kinerja rendah adalah:

1. Cakupan wilayah yang terlalu luas dibandingkan dengan kekuatan personil di Dinas Perhubungan;
2. Tidak terlaksananya beberapa pengadaan barang / Jasa karena pandemi covid 19.

Capaian kinerja dan realisasi kegiatan keseluruhan Dinas Perhubungan Kabupaten Magelang Tahun 2021 Triwulan II adalah sebagai berikut :

Tabel 2.2

Realisasi Keuangan Triwulan II Tahun 2021

Program / Kegiatan	Pagu Anggaran	Realisasi
<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINAH DAERAH KABUPATEN/KOTA</b>	<b>6.232.016.500</b>	<b>2.952.585.036</b>
<b>Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</b>	<b>38.969.920</b>	<b>22.064.710</b>
Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	9.271.000	7.432.185
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	29.698.920	14.632.525
<b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>	<b>4.942.887.400</b>	<b>2.442.587.885</b>
Penyedia Gaji dan Tunjangan ASN	4.779.047.600	2.364.494.790
Penyedia Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	68.833.000	36.618.775
Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	6.146.000	3.021.885
Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	68.551.800	27.448.990

Program / Kegiatan	Pagu Anggaran	Realisasi
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	20.309.000	11.003.445
<b>Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah</b>	<b>237.393.000</b>	<b>8.555.175</b>
Analisa dan Pengembangan Retribusi Daerah, serta Penyusunan kebijakan Retribusi Daerah	202.924.000	-
Pengolahan Data Retribusi Daerah	34.469.000	8.555.175
<b>Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</b>	<b>141.240.000</b>	<b>140.579.550</b>
Pengadaan Pakain Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	141.240.000	140.579.550
<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	<b>55.533.000</b>	<b>4.300.000</b>
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	55.533.000	4.300.000
<b>Penyediaan jasa penunjang urusan pemerintah daerah</b>	<b>266.873.180</b>	<b>88.131.511</b>
Penyediaan Jasa Surat Menyurat	50.993.180	23.425.127
Penyediaan Jasa Komuikasi sumber daya air dan listrik	215.880.000	64.706.384
<b>Pemeliharaan barang milik daerah Penunjang urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>549.120.000</b>	<b>246.366.205</b>
Penyediaan jasa pemeliharaan biaya pemeliharaan dan pajak kendaraan perorangan dinas / kendaraan dinas jabatan	263.230.100	113.909.882
Pemeliharaan Mebel	5.348.000	5.347.840
Pemeliharaan Peralatan dan mesin lainnya	46.421.900	22.170.000
Pemeliharaan atau Rehabilitasi Gedung Kantor dan bangunan lainnya	234.120.000	104.938.483
<b>PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)</b>	<b>21.965.265.230</b>	<b>10.273.889.251</b>
<b>Penyediaan perlengkapan jalan di Jalan Kabupaten/Kota</b>	<b>18.966.105.000</b>	<b>9.206.509.374</b>
Rehabilitasi dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan	18.966.105.000	9.206.509.374
<b>Pengelolaan Terminal Penumpang Tipe C</b>	<b>735.000.000</b>	<b>282.282.603</b>
Peningkatan Kapasitas SDM Pengelola terminAL Tipe C	735.000.000	282.282.603
<b>Penerbitan ijin penyelenggaraan dan pembangunan fasilitas parkir</b>	<b>473.876.760</b>	<b>176.651.938</b>
Koordinasi dan sinkronisasi pengawasan dan pelaksanaan ijin penyelenggaraan dan pembangunan fasilitas parkir kewenangan kabupaten/kota	473.876.760	176.651.938
<b>Pengujian berkala kendaraan bermotor</b>	<b>951.338.920</b>	<b>275.581.147</b>
Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	466.030.920	263.618.792

Program / Kegiatan	Pagu Anggaran	Realisasi
Penyedia Bukti Lulus Uji Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	304.668.000	-
Sosialisasi standar Operasional prosedur pengujian berkala kendaraan Bermotor	122.800.000	-
Pemeliharaan sarana dan prasarana pengujian berkala kendaraan bermotor	57.840.000	11.962.355
<b>Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota</b>	<b>744.222.050</b>	<b>289.768.549</b>
Pengawasan dan Pengendalian Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan untuk Jalan Kabupaten/Kota	730.302.050	289.528.059
Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Kabupaten/Kota	13.920.000	240.490
<b>Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang antar Kota dalam 1 Daerah Kabupaten/Kota</b>	<b>94.722.500</b>	<b>43.095.640</b>
Pengendalian dan Pengawasan ketersediaan Angkutan umum untuk jasa angkutan jasa orang dan atau barang antar kota dalam 1 Kabupaten/ Kota	94.722.500	43.095.640

Dinas Perhubungan Kabupaten Magelang Tahun Anggaran 2021 mendapatkan pagu Anggaran Refocusing sebesar Rp. 29.197.281.730, Triwulan II di Targetkan sebesar Rp. 14.380.613.682,- atau 51,00 % dengan realisasi keuangan sebesar Rp. 13.226.474.287,- atau 46,91 % sedangkan target fisik tertimbang 50.84 % dengan realisasi fisik tertimbang 50,66 %.

## 2.2. Analisis Kinerja Pelayanan PD

Capaian kinerja pelayanan Perangkat Daerah berdasarkan indikator kinerja sesuai dengan tugas dan fungsi Perangkat Daerah, serta ketentuan peraturan perundang – undangan yang terkait dengan kinerja pelayanan terdiri dari beberapa indikator berikut :

Tabel 2.3  
IKU DISHUB TAHUN 2020

PROGRAM	INDIKATOR	% PROGRAM		% IKU		CAPAIAN IKU
		TARGE T	REALISASI	TARGE T	REALISAS I	
Program Pengembangan Jaringan Prasarana Angkutan Jalan	1. Persentase peningkatan ketersediaan prasarana angkutan jalan	81,1	78,41	68,97	53,89	78,14
Program Peningkatan Pengamanan dan Keselamatan Lalu Lintas	2. Persentase peningkatan ketersediaan fasilitas perlengkapan jalan pendukung pengamanan dan keselamatan lalu lintas	59,69	46,4			
	3. Persentase peningkatan masyarakat sadar bidang keselamatan berlalu lintas	43,69	29,8			
Program Peningkatan Pelayanan Angkutan	4. Persentase peningkatan angkutan umum layak jalan	91,38	60,96			

### **2.3. Isu – Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah**

Isu – Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah Dinas Perhubungan dapat dirumuskan sebagai berikut :

1. Kurangnya sumber daya manusia berkualitas di Dinas Perhubungan;
2. Kurangnya sarana prasarana operasional di Dinas Perhubungan;
3. Belum adanya data inventaris dan titik pemeliharaan perlengkapan jalan serta peta ruas jalan rawan kecelakaan;
4. Belum optimalnya pengelolaan parkir di tepi jalan umum.

### **BAB III**

#### **PERUBAHAN RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH**

##### **4.1. Program dan Kegiatan Penetapan Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2021**

Program merupakan kumpulan kegiatan yang sistematis dan terpadu untuk mendapatkan hasil, yang dilaksanakan oleh satu atau beberapa instansi pemerintah ataupun masyarakat yang dikoordinasikan oleh instansi pemerintah guna mencapai sasaran dan tujuan tertentu.

Program pembangunan daerah Dinas Perhubungan Kabupaten Magelang Tahun 2021 merupakan pencapaian visi dan misi serta indikator kinerja utama (IKU) program dan kegiatannya sebagai berikut :

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota
  - a. Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah;
  - b. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah;
  - c. Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah;
  - d. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah;
  - e. Administrasi Umum Perangkat Daerah;
  - f. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah;
  - g. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah.
2. Program Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ)
  - a. Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota;
  - b. Pengelolaan Terminal Penumpang Tipe C;
  - c. Penerbitan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir;
  - d. Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor;
  - e. Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota;
  - f. Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang antar Kota dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota.



Tabel 4.1

## Rencana Program Tahun Anggaran 2021 pada Dinas Perhubungan Kabupaten Magelang

URUSAN/PROGRAM/ KEGIATAN/SUB KEGIATAN	APBD		Usulan Perubahan Renja	BERTAMBAH / BERKURANG
	Penetapan	Refocusing		
1	2	3	4	5=4-3
<b>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN</b>	<b>28.457.003.230,00</b>	<b>28.197.281.730,00</b>	<b>29.812.338.020,00</b>	<b>1.355.334.790,00</b>
<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA</b>	<b>6.279.819.500,00</b>	<b>6.232.016.500,00</b>	<b>6.144.263.100,00</b>	<b>-135.556.400,00</b>
<b>Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</b>	<b>39.698.920,00</b>	<b>38.969.920,00</b>	<b>38.969.920,00</b>	<b>-729.000,00</b>
Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	10.000.000,00	9.271.000,00	9.271.000,00	-729.000,00
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	29.698.920,00	29.698.920,00	29.698.920,00	0,00
<b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>	<b>4.942.887.400,00</b>	<b>4.942.887.400,00</b>	<b>4.859.584.000,00</b>	<b>-83.303.400,00</b>
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	4.779.047.600,00	4.779.047.600,00	4.672.548.000,00	-106.499.600,00
Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	68.833.000,00	68.833.000,00	96.508.000,00	27.675.000,00
Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	6.146.000,00	6.146.000,00	6.146.000,00	0,00
Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	68.551.800,00	68.551.800,00	64.073.000,00	-4.478.800,00
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	20.309.000,00	20.309.000,00	20.309.000,00	0,00

URUSAN/PROGRAM/ KEGIATAN/SUB KEGIATAN	APBD		Usulan Perubahan Renja	BERTAMBAH / BERKURANG
	Penetapan	Refocusing		
1	2	3	4	5=4-3
<b>Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah</b>	<b>250.000.000,00</b>	<b>237.393.000,00</b>	<b>230.143.000,00</b>	<b>-19.857.000,00</b>
Analisa dan Pengembangan Retribusi Daerah, serta Penyusunan Kebijakan Retribusi Daerah	210.000.000,00	202.924.000,00	197.798.000,00	-12.202.000,00
Pengolahan Data Retribusi Daerah	40.000.000,00	34.469.000,00	32.345.000,00	-7.655.000,00
Pelaporan Pengelolaan Retribusi Daerah	0	0	0	0,00
<b>Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</b>	<b>141.240.000,00</b>	<b>141.240.000,00</b>	<b>141.240.000,00</b>	<b>0,00</b>
Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	141.240.000,00	141.240.000,00	141.240.000,00	0,00
<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	<b>90.000.000,00</b>	<b>55.533.000,00</b>	<b>88.333.000,00</b>	<b>-1.667.000,00</b>
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	0	0	45.000.000,00	45.000.000,00
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	90.000.000,00	55.533.000,00	43.333.000,00	-46.667.000,00
<b>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>503.248.098,00</b>	<b>503.248.098,00</b>
Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	0	0	503.248.098,00	503.248.098,00
<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>266.873.180,00</b>	<b>266.873.180,00</b>	<b>236.873.180,00</b>	<b>-30.000.000,00</b>
Penyediaan Jasa Surat Menyurat	50.993.180,00	50.993.180,00	50.993.180,00	0,00

URUSAN/PROGRAM/ KEGIATAN/SUB KEGIATAN	APBD		Usulan Perubahan Renja	BERTAMBAH / BERKURANG
	Penetapan	Refocusing		
1	2	3	4	5=4-3
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	215.880.000,00	215.880.000,00	185.880.000,00	-30.000.000,00
<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>549.120.000,00</b>	<b>549.120.000,00</b>	<b>549.120.000,00</b>	<b>0,00</b>
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	263.230.100,00	263.230.100,00	263.230.100,00	0,00
Pemeliharaan Mebel	5.348.000,00	5.348.000,00	5.348.000,00	0,00
Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	46.421.900,00	46.421.900,00	46.421.900,00	0,00
Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	234.120.000,00	234.120.000,00	234.120.000,00	0,00
<b>PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)</b>	<b>22.177.183.730,00</b>	<b>21.965.265.230,00</b>	<b>23.668.074.920,00</b>	<b>1.490.891.190,00</b>
<b>Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota</b>	<b>19.050.525.000,00</b>	<b>18.966.105.000,00</b>	<b>20.689.290.000,00</b>	<b>1.638.765.000,00</b>
Pembangunan Prasarana Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	0	0	100.000.000,00	100.000.000,00
Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	0,00	0,00	1.578.917.000,00	1.578.917.000,00
Rehabilitasi dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan	19.050.525.000,00	18.966.105.000,00	19.010.373.000,00	-40.152.000,00
<b>Pengelolaan Terminal Penumpang Tipe C</b>	<b>735.000.000,00</b>	<b>735.000.000,00</b>	<b>735.000.000,00</b>	<b>0,00</b>

URUSAN/PROGRAM/ KEGIATAN/SUB KEGIATAN	APBD		Usulan Perubahan Renja	BERTAMBAH / BERKURANG
	Penetapan	Refocusing		
1	2	3	4	5=4-3
Peningkatan Kapasitas SDM Pengelola Terminal Tipe C	735.000.000,00	735.000.000,00	735.000.000,00	0,00
<b>Penerbitan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir</b>	<b>495.746.760,00</b>	<b>473.876.760,00</b>	<b>434.152.000,00</b>	<b>-61.594.760,00</b>
Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir Kewenangan Kabupaten/Kota	495.746.760,00	473.876.760,00	434.152.000,00	-61.594.760,00
<b>Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor</b>	<b>953.849.920,00</b>	<b>951.338.920,00</b>	<b>931.432.420,00</b>	<b>-22.417.500,00</b>
Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	466.030.920,00	466.030.920,00	486.030.920,00	20.000.000,00
Penyediaan Bukti Lulus Uji Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	304.668.000,00	304.668.000,00	283.418.000,00	-21.250.000,00
Sosialisasi Standar Operasional Prosedur Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	125.311.000,00	122.800.000,00	102.893.500,00	-22.417.500,00
Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	57.840.000,00	57.840.000,00	59.090.000,00	1.250.000,00
<b>Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota</b>	<b>832.842.050,00</b>	<b>744.222.050,00</b>	<b>792.478.000,00</b>	<b>-40.364.050,00</b>
Pengawasan dan Pengendalian Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan untuk Jalan Kabupaten/Kota	817.842.050,00	730.302.050,00	778.558.000,00	-39.284.050,00
Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Kabupaten/Kota	15.000.000,00	13.920.000,00	13.920.000,00	-1.080.000,00

URUSAN/PROGRAM/ KEGIATAN/SUB KEGIATAN	APBD		Usulan Perubahan Renja	BERTAMBAH / BERKURANG
	Penetapan	Refocusing		
1	2	3	4	5=4-3
<b>Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang antar Kota dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota</b>	109.220.000,00	94.722.500,00	85.722.500,00	-23.497.500,00
Pengendalian dan Pengawasan Ketersediaan Angkutan Umum untuk Jasa angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (satu) Kabupaten/Kota	109.220.000,00	94.722.500,00	85.722.500,00	-23.497.500,00

## **BAB IV**

### **PENUTUP**

Penyusunan Penetapan Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah Dinas Perhubungan Kabupaten Magelang Tahun 2021 senantiasa memperhatikan prioritas pembangunan sesuai RPJMD Kabupaten Magelang Tahun 2019 - 2024 dan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2019 - 2024 guna efektifitas dan efisiensi penyusunan prioritas pembangunan Tahun 2021. Berbagai bentuk strategi yang telah dipilih baik yang berupa kebijakan maupun program dan kegiatan dalam dokumen Rencana Strategis ini harus diimplementasikan secara tuntas dan jelas kedalam rencana kegiatan tahunan untuk mewujudkan visi, misi, tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan.

Mengingat bahwa upaya yang harus ditempuh tidaklah mudah maka Dinas Perhubungan Kabupaten Magelang harus berupaya semaksimal mungkin menggunakan Penetapan Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah Dinas Perhubungan Kabupaten Magelang Tahun 2021 ini sebagai pedoman perencanaan. Penetapan Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2021 ini juga merupakan dasar evaluasi dan laporan pelaksanaan dari kinerja tahunan Dinas Perhubungan Kabupaten Magelang. Dengan demikian, setelah Penetapan Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2021 ini ditetapkan, Dinas Perhubungan Kabupaten Magelang telah mempunyai pedoman atau arah yang lebih tegas dan jelas didalam melaksanakan rencana pembangunan jangka pendek tahunan yang sesuai dengan Perangkat Daerah baru.

Kota Mungkid,      September 2021  
KEPALA DINAS PERHUBUNGAN  
KABUPATEN MAGELANG



**IMAM BASORI, S.Sos., M.Si.**

Pembina Utama Muda

NIP. 19701115 199003 1 003

# **LAMPIRAN**

**Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah  
Kabupaten Magelang  
Tahun 2021**

**Unit Organisasi : 2.15.0.00.0.00.01.0000 DINAS PERHUBUNGAN  
Sub Unit Organisasi : 2.15.0.00.0.00.01.0000 DINAS PERHUBUNGAN**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2021								Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022							
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)				
						Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan					Tolok Ukur	Target					
						Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum						Sesudah			
2		<b>URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR</b>																			
2	15		<b>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN</b>													28,457,003,230	29,812,338,020			9,933,768,350	
2	15	01	<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA</b>													6,279,819,500	6,144,263,100			7,041,161,000	
2	15	01	2.01	<b>Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</b>													39,698,920	38,969,920			42,176,250
2	15	01	2.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Persentase ketercapaian pelayanan umum dan kepegawaian perangkat daerah	Jumlah Dokumen Renja yang disusun Jumlah Dokumen Renstra Perubahan yang disusun	Cakupan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kab. Magelang, Mungkid, Bumirejo	50 %	50 %	12 dokumen	2 dokumen 1 dokumen	50 %	50 %	10,000,000	9,271,000	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	Persentase ketercapaian pelayanan umum dan kepegawaian perangkat daerah	50 %	23,000,000
2	15	01	2.01	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Persentase ketercapaian pelayanan umum dan kepegawaian perangkat daerah	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Cakupan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kab. Magelang, Mungkid, Bumirejo	50 %	50 %	15 dokumen	15 dokumen	50 %	50 %	29,698,920	29,698,920	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	Persentase ketercapaian pelayanan umum dan kepegawaian perangkat daerah	50 %	19,176,250
2	15	01	2.02	<b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>													4,942,887,400	4,859,584,000			5,713,523,150



**Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah  
Kabupaten Magelang**

													Tahun 2021								
2	1	0	2.0	0	Unit Organisasi : 2.15.0.00.0.00.01.0000 DINAS PERHUBUNGAN Sub Unit Organisasi : 2.15.0.00.0.00.01.0000 DINAS PERHUBUNGAN Gaji dan Tunjangan ASN	Persentase ketercapaian perencanaan, evaluasi kinerja OPD dan keuangan perangkat daerah	Jumlah Gaji dan Tunjangan ASN	Cakupan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Kab. Magelang, Mungkid, Bumirejo	50 %	50 %	53 orang	51 orang	50 %	50 %	4,779,047,600	4,672,548,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Persentase ketercapaian perencanaan, evaluasi kinerja OPD dan keuangan perangkat daerah	50 %	5,229,829,700
2	1	0	2.0	0	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Persentase ketercapaian perencanaan, evaluasi kinerja OPD dan keuangan perangkat daerah	Jumlah Pelaksanaan Pengelola Keuangan PD	Cakupan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Kab. Magelang, Mungkid, Bumirejo	50 %	50 %	12 bulan	12 bulan	50 %	50 %	68,833,000	96,508,000	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	Persentase ketercapaian perencanaan, evaluasi kinerja OPD dan keuangan perangkat daerah	50 %	382,384,200
2	1	0	2.0	0	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Persentase ketercapaian perencanaan, evaluasi kinerja OPD dan keuangan perangkat daerah	Jumlah Dokumen Kegiatan yang diverifikasi	Cakupan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Kab. Magelang, Mungkid, Bumirejo	50 %	50 %	12 kegiatan	14 kegiatan	50 %	50 %	6,146,000	6,146,000	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	Persentase ketercapaian perencanaan, evaluasi kinerja OPD dan keuangan perangkat daerah	50 %	7,067,900

**Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah  
Kabupaten Magelang  
Tahun 2021**

Unit Organisasi : 2.15.0.00.0.00.01.0000 DINAS PERHUBUNGAN  
Sub Unit Organisasi : 2.15.0.00.0.00.01.0000 DINAS PERHUBUNGAN

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2021								Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022				
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)	
						Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan		Sebelum			Sesudah	Tolok Ukur		Target
						Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah							
210204	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Persentase ketercapaian perencanaan, evaluasi kinerja OPD dan keuangan perangkat daerah	Jumlah Dokumen Laporan Akuntansi yang disusun	Cakupan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Kab. Magelang, Mungkid, Bumirejo	50 %	50 %	12 dokumen	12 dokumen	50 %	50 %	68,551,800	64,073,000	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	Persentase ketercapaian perencanaan, evaluasi kinerja OPD dan keuangan perangkat daerah	50 %	76,645,200	
210205	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Persentase ketercapaian perencanaan, evaluasi kinerja OPD dan keuangan perangkat daerah	Jumlah Dokumen Laporan Keuangan Akhir Tahun	Cakupan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Kab. Magelang, Mungkid, Bumirejo	50 %	50 %	1 dokumen	1 dokumen	50 %	50 %	20,309,000	20,309,000	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	Persentase ketercapaian perencanaan, evaluasi kinerja OPD dan keuangan perangkat daerah	50 %	17,596,150	
2104	<b>Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah</b>												<b>250,000,000</b>	<b>230,143,000</b>		<b>210,000,000</b>		
21042	Analisa dan Pengembangan Retribusi Daerah, serta Penyusunan Kebijakan Retribusi Daerah	Persentase ketercapaian perencanaan, evaluasi kinerja OPD dan keuangan perangkat daerah	Jumlah dokumen survey potensi pendapatan	Cakupan Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	50 %	50 %	2 dokumen	2 dokumen	50 %	50 %	210,000,000	197,798,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Persentase ketercapaian perencanaan, evaluasi kinerja OPD dan keuangan perangkat daerah	50 %	210,000,000	
21045	Pengolahan Data Retribusi Daerah	Persentase ketercapaian perencanaan, evaluasi kinerja OPD dan keuangan perangkat daerah	Jumlah Dokumen Retribusi Daerah	Cakupan Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah	Kab. Magelang, Mungkid, Bumirejo	50 %	50 %	1 dokumen	1 dokumen	50 %	50 %	40,000,000	32,345,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Persentase ketercapaian perencanaan, evaluasi kinerja OPD dan keuangan perangkat daerah	50 %	0	
21047	Pelaporan Pengelolaan Retribusi Daerah	Persentase ketercapaian perencanaan, evaluasi kinerja OPD dan keuangan perangkat daerah		Cakupan Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah	Kab. Magelang, Mungkid, Bumirejo	50 %	50 %			50 %	50 %	0	0		Persentase ketercapaian perencanaan, evaluasi kinerja OPD dan keuangan perangkat daerah	50 %	0	
2105	<b>Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</b>												<b>141,240,000</b>	<b>141,240,000</b>		<b>0</b>		
21052	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Persentase ketercapaian pelayanan umum dan kepegawaian perangkat daerah	Jumlah Pakaian Dinas dan Atribut yang Terbeli	Cakupan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Kab. Magelang, Mungkid, Bumirejo	50 %	50 %	153 set	153 set	50 %	50 %	141,240,000	141,240,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Persentase ketercapaian pelayanan umum dan kepegawaian perangkat daerah	50 %	0	

**Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah  
Kabupaten Magelang  
Tahun 2021**

Unit Organisasi : 2.15.0.00.0.00.01.0000 DINAS PERHUBUNGAN  
Sub Unit Organisasi : 2.15.0.00.0.00.01.0000 DINAS PERHUBUNGAN

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2021								Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022										
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)							
						Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan		Sebelum			Sesudah	Sebelum		Sesudah	Tolok Ukur	Target				
						Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah													
2 5 1 6	Administrasi Umum Perangkat Daerah																		90,000,000	88,333,000				5,589,000
2 5 1 6 2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Persentase ketercapaian pelayanan umum dan kepegawaian perangkat daerah	Jumlah Peralatan Kantor yang Terbeli	Cakupan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kab. Magelang, Mungkid, Semua Kelurahan	50 %	50 %		1 paket	50 %	50 %			0	45,000,000			Persentase ketercapaian pelayanan umum dan kepegawaian perangkat daerah	50 %				0	
2 5 1 6 9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Persentase ketercapaian pelayanan umum dan kepegawaian perangkat daerah	Jumlah Perjalanan Dinas Luar Daerah yang Terlaksana Jumlah Perjalanan Dinas Dalam Daerah yang Terlaksana Jumlah Rapat Koordinasi yang diselenggarakan	Cakupan Administrasi Umum Perangkat Daerah		50 %	50 %	57 kali 8 kali 10 kali	32 kali 8 kali 10 kali	50 %	50 %			90,000,000	43,333,000	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya		Persentase ketercapaian pelayanan umum dan kepegawaian perangkat daerah	50 %			5,589,000		
2 5 1 7	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah														0	0								0
2 5 1 7 2	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan		Jumlah Kendaraan Dinas yang Terbeli		Kab. Magelang, Mungkid, Semua Kelurahan				1 unit					0	0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)								0
2 5 1 8	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah														266,873,180	236,873,180								514,395,000
2 5 1 8 1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Persentase ketercapaian pelayanan umum dan kepegawaian perangkat daerah	Jumlah Arsip yang Dikelola Jumlah Surat yang Dikelola	Cakupan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		50 %	50 %	2 jenis 6400 surat	2 jenis 6400 surat	50 %	50 %			50,993,180	50,993,180	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase ketercapaian pelayanan umum dan kepegawaian perangkat daerah	50 %				96,600,000	

**Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah  
Kabupaten Magelang  
Tahun 2021**

Unit Organisasi : 2.15.0.00.0.00.01.0000 DINAS PERHUBUNGAN  
Sub Unit Organisasi : 2.15.0.00.0.00.01.0000 DINAS PERHUBUNGAN

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2021										Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022				
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)		
						Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan		Sebelum	Sesudah			Sebelum	Sesudah		Tolok Ukur	Target
						Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah									
210202	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Persentase ketercapaian pelayanan umum dan kepegawaian perangkat daerah	Jumlah Rekening Jasa Telfon yang terbayar Jumlah Rekening Jasa Air yang terbayar Jumlah Rekening Jasa Internet yang terbayar Jumlah Rekening Jasa Listrik yang terbayar Jumlah Surat Kabar yang Terbayar	Cakupan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		50 %	50 %	3 rekening 6 rekening 1 rekening 9 rekening 2 Surat Kabar	3 rekening 6 rekening 1 rekening 9 rekening 2 Surat Kabar	50 %	50 %	215,880,000	185,880,000	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	Persentase ketercapaian pelayanan umum dan kepegawaian perangkat daerah	50 %	417,795,000			
210202	<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>										549,120,000	549,120,000			555,477,600					
210202	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Persentase ketercapaian pelayanan umum dan kepegawaian perangkat daerah	Jumlah Kendaraan Roda 2 yang Dipelihara Jumlah Kendaraan Roda 4 yang Dipelihara	Cakupan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		50 %	50 %	25 Kendaraan 8 Kendaraan	25 Kendaraan 9 Kendaraan	50 %	50 %	263,230,100	263,230,100	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil	Persentase ketercapaian pelayanan umum dan kepegawaian perangkat daerah	50 %	376,388,215			
210202	Pemeliharaan Mebel	Persentase ketercapaian pelayanan umum dan kepegawaian perangkat daerah	Jumlah Perlengkapan Kantor yang Dipelihara	Cakupan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kab. Magelang, Mungkid, Semua Kelurahan	50 %	50 %	1 paket	1 paket	50 %	50 %	5,348,000	5,348,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Persentase ketercapaian pelayanan umum dan kepegawaian perangkat daerah	50 %	8,749,200			
210202	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Persentase ketercapaian pelayanan umum dan kepegawaian perangkat daerah	Jumlah Peralatan Kantor yang Dipelihara	Cakupan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		50 %	50 %	1 paket	1 paket	50 %	50 %	46,421,900	46,421,900	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Persentase ketercapaian pelayanan umum dan kepegawaian perangkat daerah	50 %	53,385,185			
210202	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Persentase ketercapaian pelayanan umum dan kepegawaian perangkat daerah	Jumlah Gedung Kantor Yang Dipelihara	Cakupan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		50 %	50 %	1 Paket	1 Paket	50 %	50 %	234,120,000	234,120,000	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil	Persentase ketercapaian pelayanan umum dan kepegawaian perangkat daerah	50 %	116,955,000			

**Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah  
Kabupaten Magelang  
Tahun 2021**

Unit Organisasi : 2.15.0.00.0.00.01.0000 DINAS PERHUBUNGAN  
Sub Unit Organisasi : 2.15.0.00.0.00.01.0000 DINAS PERHUBUNGAN

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2021								Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022						
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)			
						Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan		Sebelum			Sesudah	Sebelum		Sesudah	Tolok Ukur	Target
						Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah									
2152		<b>PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)</b>								22,177,183,730	23,668,074,920				2,892,607,350					
2152		<b>Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota</b>								19,050,525,000	20,689,290,000				180,000,000					
2152	2.001	Pembangunan Prasarana Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	Persentase ketersediaan fasilitas perlengkapan jalan pendukung pengamanan dan keselamatan lalu lintas	Jumlah halte yang terbangun	Cakupan Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	Kab. Magelang, Tegalrejo, Semua Kelurahan	69,24 %	69,24 %		1 halte	69,24 %	69,24 %	0	100,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Persentase ketersediaan fasilitas perlengkapan jalan pendukung pengamanan dan keselamatan lalu lintas	69,24 %	180,000,000		
2152	2.002	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	Persentase ketersediaan fasilitas perlengkapan jalan pendukung pengamanan dan keselamatan lalu lintas	Jumlah cermin tikungan yang terbangun Jumlah Flasing yang terbangun Jumlah LPJU yang terbangun Jumlah Rambu yang terbangun	Cakupan Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota		69,24 %	69,24 %		10 buah 1 buah 266 titik 30 buah	69,24 %	69,24 %	0	1,578,917,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Persentase ketersediaan fasilitas perlengkapan jalan pendukung pengamanan dan keselamatan lalu lintas	69,24 %	0		
2152	2.004	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan	Persentase ketersediaan fasilitas perlengkapan jalan pendukung pengamanan dan keselamatan lalu lintas	Jumlah CCTV yang terpelihara Jumlah Rekening LPJU yang Terbayarkan Jumlah Titik LPJU yang Terpelihara Jumlah Traffic Light yang Terpelihara	Cakupan Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	Kab. Magelang, Kecamatan, Semua Kelurahan	69,24 %	69,24 %		1 paket 3 rayon 3000 titik 1 paket	69,24 %	69,24 %	19,050,525,000	19,010,373,000	Pajak Penerangan Jalan Pajak Penerangan Jalan - Penyediaan Penerangan Jalan	Persentase ketersediaan fasilitas perlengkapan jalan pendukung pengamanan dan keselamatan lalu lintas	69,24 %	0		
2152	2.003		<b>Pengelolaan Terminal Penumpang Tipe C</b>								735,000,000	735,000,000				569,351,200				
2152	2.005	Peningkatan Kapasitas SDM Pengelola Terminal Tipe C	Persentase ketersediaan prasarana angkutan jalan	Jumlah Terminal yang Dikelola	Cakupan Pengelolaan Terminal Penumpang Tipe C	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	85,82 %	85,82 %		6 terminal	85,82 %	85,82 %	735,000,000	735,000,000	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil	Persentase ketersediaan prasarana angkutan jalan	85,82 %	569,351,200		
2152	2.004		<b>Penerbitan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir</b>								495,746,760	434,152,000				263,918,100				

**Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah  
Kabupaten Magelang  
Tahun 2021**

Unit Organisasi : 2.15.0.00.0.00.01.0000 DINAS PERHUBUNGAN  
Sub Unit Organisasi : 2.15.0.00.0.00.01.0000 DINAS PERHUBUNGAN

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2021								Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022				
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)	
						Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan		Sebelum			Sesudah	Tolok Ukur		Target
						Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah							
210202	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir Kewenangan Kabupaten/Kota	Persentase ketersediaan prasarana angkutan jalan	Jumlah Titik Parkir yang Dikelola	Cakupan Penerbitan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir		85,82 %	85,82 %	250 titik	250 titik	85,82 %	85,82 %	495,746,760	434,152,000	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil	Persentase ketersediaan prasarana angkutan jalan	85,82 %	263,918,100	
210205	<b>Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor</b>												<b>953,849,920</b>	<b>931,432,420</b>			<b>983,818,100</b>	
2102051	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Persentase layanan uji kendaraan bermotor wajib uji	Jumlah Cetakan Kartu Uji Jumlah Peralatan kantor yang terbeli	Cakupan Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Kab. Magelang, Mungkid, Bumirejo	91,70 %	91,70 %	1 paket	1 paket 1 paket	91,7 %	91,7 %	466,030,920	486,030,920	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Persentase layanan uji kendaraan bermotor wajib uji	91,70 %	530,455,900	
2102054	Penyediaan Bukti Lulus Uji Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Persentase layanan uji kendaraan bermotor wajib uji	Jumlah Bukti Lulus Uji	Cakupan Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Kab. Magelang, Mungkid, Bumirejo	91,70 %	91,70 %	12000 set	11200 set	91,7 %	91,7 %	304,668,000	283,418,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Persentase layanan uji kendaraan bermotor wajib uji	91,70 %	379,118,200	
2102055	Sosialisasi Standar Operasional Prosedur Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Persentase layanan uji kendaraan bermotor wajib uji	Jumlah sosialisasi yang dilaksanakan	Cakupan Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	91,70 %	91,70 %	9 kali	9 kali	91,7 %	91,7 %	125,311,000	102,893,500	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Persentase layanan uji kendaraan bermotor wajib uji	91,70 %	0	
2102057	Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Persentase layanan uji kendaraan bermotor wajib uji	Jumlah Alat Uji Kendaraan Bermotor yang Dipelihara	Cakupan Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor		91,70 %	91,70 %	12 alat uji	12 alat uji	91,7 %	91,7 %	57,840,000	59,090,000	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil	Persentase layanan uji kendaraan bermotor wajib uji	91,70 %	74,244,000	
210206	<b>Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota</b>												<b>832,842,050</b>	<b>792,478,000</b>			<b>827,789,550</b>	

**Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah  
Kabupaten Magelang  
Tahun 2021**

Unit Organisasi : 2.15.0.00.0.00.01.0000 DINAS PERHUBUNGAN  
Sub Unit Organisasi : 2.15.0.00.0.00.01.0000 DINAS PERHUBUNGAN

Kode	Usuran/ Bidang Usuran/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2021										Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022				
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)		
						Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan		Sebelum	Sesudah			Sebelum	Sesudah		Tolok Ukur	Target
						Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah									
2102064	Pengawasan dan Pengendalian Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan untuk Jalan Kabupaten/Kota	Persentase masyarakat sadar bidang keselamatan ber lalu lintas	Jumlah Operasi Laik Jalan yang Dilaksanakan Jumlah Pengamanan yang Dilaksanakan Jumlah Posko yang Diselenggarakan	Cakupan Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota	Kab. Magelang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	55,73 %	55,73 %	26 kali 9 kali 1 kali	42 kali 100 kali 2 kali	55,73 %	55,73 %	817,842,050	778,558,000	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil	Persentase masyarakat sadar bidang keselamatan ber lalu lintas	55,73 %	827,789,550			
2102065	Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Kabupaten/Kota	Persentase masyarakat sadar bidang keselamatan ber lalu lintas	Jumlah Forum LLAJ yang Diselenggarakan	Cakupan Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota	Kab. Magelang, Mungkid, Bumirejo	55,73 %	55,73 %	2 kali	2 kali	55,73 %	55,73 %	15,000,000	13,920,000	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil	Persentase masyarakat sadar bidang keselamatan ber lalu lintas	55,73 %	0			
210209	<b>Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang antar Kota dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota</b>											<b>109,220,000</b>	<b>85,722,500</b>			<b>67,730,400</b>				
210292	Pengendalian dan Pengawasan Ketersediaan Angkutan Umum untuk Jasa angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (satu) Kabupaten/Kota	Persentase masyarakat sadar bidang keselamatan ber lalu lintas	Jumlah Pengawasan Angkutan Umum ( Angkutan Orang )	Cakupan Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang antar Kota dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota		55,73 %	55,73 %	30 jalur	20 jalur	55,73 %	55,73 %	109,220,000	85,722,500	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil	Persentase masyarakat sadar bidang keselamatan ber lalu lintas	55,73 %	67,730,400			
<b>TOTAL</b>												<b>28,457,003,230</b>	<b>29,812,338,020</b>			<b>43,038,575,700</b>				